



Katalog BPS : 9302004.6401

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN PASER
2010 - 2014**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER**



Katalog BPS : 9302004.6401

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN PASER
2010 - 2014**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN PASER
2010 - 2014**

No. Katalog : 9199007.6401
No. Publikasi : 64.015.1506
Ukuran buku : 21 cm x 28 cm
Jumlah halaman : ix + 61 halaman

Naskah :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Penyunting :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Gambar kulit :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014*, merupakan pasangan dari publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser menurut Lapangan Usaha, yang diterbitkan secara berkala setiap tahun.

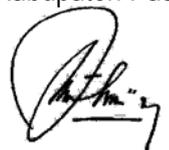
Jika dalam publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha diperoleh gambaran struktur perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan sebagainya, maka dalam publikasi PDRB menurut Penggunaan diperoleh gambaran mengenai produk domestik regional yang diuraikan dalam komponen-komponen pengeluaran. Komponen-komponen tersebut adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto (ekspor dikurangi dengan impor), Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Adapun data yang dipakai dalam penghitungan komponen-komponen PDRB menurut Penggunaan diperoleh dari dinas/instansi/lembaga pemerintah maupun pihak swasta, juga data yang bersumber dari hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Diharapkan publikasi ini akan membantu pihak perencana daerah, para analis, serta lembaga/instansi pemerintah lainnya maupun pihak swasta.

Disadari dalam penerbitan kali ini, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat penyempurnaan pada penerbitan yang akan datang. Dengan demikian saran dan kritik dari berbagai pihak selalu kami harapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diterbitkan, diucapkan terima kasih.

Tana Paser, Oktober 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Paser,



Ir Bahramsyah

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK ..	viii
DAFTAR LAMPIRAN ..	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Umum	1
1.2. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	1
1.3. Kegunaan Statistik PDRB	3
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga	5
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	9
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	13
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
2.5. Perubahan Inventori	21
2.6. Ekspor dan Impor.....	26

BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PASER BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN, TAHUN 2010 - 2014.....	30
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran.....	31
3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah tangga	35
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	38
3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	39
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	40
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori	41
3.7. Perkembangan Ekspor Netto	42
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PASER MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2010 – 2014	44
4.1. PDRB Perkapita	44
4.3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB.....	45
4.4. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	46
4.5. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	47
BAB V. PENUTUP	49
DAFTAR ISTILAH PENTING	50
LAMPIRAN (Tabel-tabel)	53

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	35
Tabel 3.2. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	36
Tabel 3.3.. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	37
Tabel 3.4.. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	38
Tabel 3.5 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	39
Tabel 3.6.. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	40
Tabel 3.7. Perkembangan Pembentukan Modal Bruto (PMTB) Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	41
Tabel 3.8. Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	42
Tabel 3.9 Perkembangan Net Ekspor (Ekpor dikurang Impor) Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	43
Tabel 4.1.. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	45
Tabel 4.2. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	46

Tabel 4.3.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014.....	46
Tabel 4.4.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014.....	48

<http://paserkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 3.1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	31
Grafik 3.2. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014.....	32
Grafik 3.3. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014.....	33
Grafik 3.4. Pertumbuhan PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2014 (persen).....	34
Grafik 3.5. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2014 (persen).....	34

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014 (Juta Rupiah)	54
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2010 – 2014 (Juta Rupiah)	55
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2010 – 2014 (Persen)	56
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2010 – 2014 (Persen)	57
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2014 (Persen)	58
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2014 (Persen)	59
Tabel 7. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014	60
Tabel 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran , Kabupaten Paser, Tahun 2010 – 2014	61

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 UMUM

Penyusunan publikasi PDRB Kabupaten Paser menurut pengeluaran dimaksudkan untuk memenuhi permintaan kebutuhan data tentang komponen PDRB pengeluaran yang semakin meningkat, misalnya mengenai pengeluaran konsumsi rumahtangga baik berupa konsumsi makanan maupun non makanan juga pengeluaran konsumsi pemerintah baik berupa pengeluaran aparatur maupun pelayanan publik. Hal yang juga penting adalah terkait dengan perkembangan data investasi fisik (PMTB) hingga ekspor hasil SDA Kabupaten Paser.

Dalam publikasi ini pembahasan dimulai dengan tinjauan PDRB menurut pengeluaran secara agregat, dan dilanjutkan dengan perkembangan rincian komponen PDRB menurut pengeluaran. Adapun cakupan periode pembahasan adalah selama periode tahun 2010 - 2014

1.2 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi (*production approach*)

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha. PDRB menurut produksi disebut juga sebagai PDRB menurut Lapangan Usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan (*income approach*)

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran (*expenditure approach*)

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran akhir konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan dari faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara

ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

PDRB menurut pengeluaran disebut juga sebagai PDRB menurut permintaan atau PDRB menurut pengeluaran. Dilihat dari sisi permintaan, PDRB merupakan jumlah seluruh nilai akhir barang jadi dan jasa (*output*) yang diproduksi di suatu daerah/wilayah selama periode waktu tertentu. Yang dimaksud dengan barang jadi adalah barang yang tidak digunakan untuk diproses kembali oleh suatu industri, tetapi untuk dikonsumsi langsung oleh penduduk. Barang setengah jadi (*intermediate goods*) tidak termasuk dalam penghitungan PDRB, karena barang setengah jadi digunakan untuk diproses kembali menjadi barang jadi, sehingga nilai barang setengah jadi tersebut sudah termasuk di dalam barang jadi yang dihasilkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah seluruh pengeluaran (*expenditure*) yang dilakukan oleh seluruh institusi pada suatu daerah/wilayah selama satu tahun. Institusi-institusi tersebut terdiri atas rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Dengan demikian, sesuai dengan konsep ekonomi makro, PDRB menurut pengeluaran terbagi menjadi empat kelompok pengeluaran utama, yaitu pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk kegiatan investasi, pengeluaran/belanja sektor pemerintahan dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Penghitungan PDRB menurut pengeluaran disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010. Penghitungan atas dasar harga berlaku adalah penghitungan terhadap semua komponen PDRB yang dinilai atas dasar harga masing-masing tahun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 adalah penghitungan terhadap semua komponen PDRB yang dinilai berdasarkan harga tahun dasar yaitu tahun 2010.

1.3 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara/wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara/wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara/wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

Pembahasan dalam bagian ini dimulai dengan beberapa definisi dasar dan diuraikan secara lengkap mengenai konsep, definisi, serta metodologi yang digunakan dalam penghitungan komponen-komponen PDRB Menurut pengeluaran.

2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)

2.1.1. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

2.1.2. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran atau pembelian barang dan jasa yang tujuannya hanya untuk dikonsumsi, dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkiran dalam suatu periode tertentu. Selain pembelian untuk bahan makanan, pakaian, bahan bakar, barang tahan lama dan jasa-jasa, pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk juga pembelian barang yang tidak ada duanya (tidak diproduksi kembali) seperti karya seni, barang antik. Pengeluaran untuk rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan kecil rumah, rekening air, listrik, telepon, dan lain-lain merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sedangkan pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi.

2.1.3. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

1. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
2. Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
3. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
4. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
5. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

1. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
2. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
3. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
4. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Pada dasarnya penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga menggunakan pendekatan penduduk. Namun demikian, konsumsi rumah tangga dapat juga dihitung dengan menggunakan pendekatan wilayah.

2.1.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
- Jumlah penduduk pertengahan tahun, bersumber dari publikasi Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan dari data proyeksi penduduk.
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu.
- Indeks Harga Konsumen (IHK), Rata-rata harga eceran dan Indeks Harga Konsumen bersumber dari Statistik Harga Konsumen di kota dan pedesaan.
- Data-data lain seperti informasi dari asosiasi dan perusahaan retail.

2.1.5. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (adjustment). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (adjustment) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:

- a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
 3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP ;
 4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
 5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dengan 7 kelompok COICOP;
 6. PKRT adh Konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

2.2.1. Pendahuluan

Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah berbagai pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa oleh lembaga-lembaga sosial yang secara prinsip mempunyai fungsi utama dalam melayani RT. Pengeluaran jenis institusi ini digolongkan sebagai bagian dari pengeluaran akhir untuk tujuan menjaga keberlangsungan usahanya.

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagianggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2.2.2. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.2.3. Cakupan

Lembaga Nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), mencakup 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu: Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Organisasi Sosial (ORSOS), Organisasi Profesi (ORPROF), Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga dan Hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa.

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasartersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

2.2.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PK-LNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
- Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil up-dating direktori LNPRT.
- Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

Data yang dibutuhkan untuk penyusunan penghitungan konsumsi akhir LNPRT diperoleh langsung dari hasil survei khusus. Data tersebut berupa nilai seluruh barang dan jasa yang dikeluarkan oleh lembaga itu sendiri, maupun yang berasal dari transfer pihak lain yang digunakan dalam rangka menghasilkan jasa layanan.

Data pendukung yang dibutuhkan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) Tahunan untuk masing-masing kelompok pengeluaran yang datanya diperoleh dari Statistik Harga Konsumen. Data ini digunakan untuk menentukan nilai konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga konstan.

Untuk melakukan estimasi nilai konsumsi akhir, masih diperlukan data jumlah populasi LNPRT untuk masing-masing bentuk lembaga. Data ini diperoleh dari hasil kegiatan listing ke instansi-instansi terkait dan pengecekan langsung ke lapangan.

2.2.5. Metode Perhitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

Keterangan :

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, = 1, 2, 3, ..., 7

j : jenis pengeluaran LNPRT, = 1, 2, 3, ..., 19

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

Keterangan : X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRTADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.2.6. Keterbatasan dan masalah dalam penghitungan

Masalah yang biasanya ditemukan dalam penghitungan adalah:

1. Adanya nilai pengeluaran yang sangat besar dibanding dengan nilai yang pada umumnya dikeluarkan. Hal ini terjadi karena masih bercampurnya pengeluaran dari kegiatan jasa yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan jasa layanan, seperti jasa pendidikan dan kesehatan dan kegiatan ekonomis produktif.
2. Terkadang sulit menentukan bentuk lembaga jika hanya melihat dari lembaga. Suatu lembaga dengan satu nama terkadang bisa melakukan kegiatan lebih dari satu, seperti panti asuhan yatim piatu, bantuan sosial, dan pendidikan. Hal ini sulit dipisahkan karena lembaga tersebut hanya mempunyai satu pembukaan.
3. Banyak lembaga yang tidak mempunyai pembukuan yang baik dan terinci, sehingga banyak pengeluaran yang ditanyakan sulit untuk dijawab.

2.2.7. Perlakuan khusus

Pada lembaga yang mempunyai lebih dari satu kegiatan pelayanan, sedapat mungkin dipisahkan jenis pengeluarannya untuk masing-masing kegiatan. Pada umumnya masing-masing LNPRT ini mempunyai ciri kegiatan yang berbeda yang pada akhirnya mengakibatkan struktur pengeluarannya juga berbeda-beda. Penetapan bentuk lembaga ini ditentukan oleh kegiatan ataupun tujuannya yang paling dominan.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

2.3.1. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

2.3.2. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non-pasar lainnya pemerintah.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah, dan hasil penjualannya disebut **pendapatan dari barang yang dihasilkan**.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa), Pendapatan yang diterima pemerintah dari hasil

kegiatan seperti ini disebut **pendapatan dari jasa yang diberikan**.

2.3.3. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup :

- a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi;
- b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan;
- c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi;
- d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

2.3.4. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

Dalam penyusunan pengeluaran konsumsi pemerintah, digunakan berbagai macam data seperti:

1. Untuk pemerintah daerah berupa data Statistik Keuangan Daerah Provinsi (hasil pengolahan daftar Keuangan Daerah Provinsi seluruh Indonesia), Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (hasil kompilasi dan akumulasi data yang diterima dari Kantor Pemerintah Daerah seluruh Kabupaten/Kota), Statistik Keuangan Desa (hasil pengolahan survei yang telah dilaksanakan langsung pada desa/kelurahan terpilih) yang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan,

Direktorat Statistik Keuangan dan Harga, BPS. Data ini memuat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing tingkat pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa). Disamping itu untuk melengkapi data ini, diperoleh juga data dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK), Departemen Keuangan.

2. Data jumlah pegawai negeri sipil yang dirinci menurut status kepegawaian, golongan, departemen/lembaga, dan provinsi yang diperoleh dari BKN (Badan Kepegawaian Negara).

2.3.4. Metode Perhitungan

- a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

- b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

2.4.1. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.2. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode. Barang modal juga dapat diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Meskipun mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun barang modal tetap mempunyai batasan usia ekonomi yang nilainya diukur melalui proses keausan (susut).

2.4.3. Cakupan

PMTB menurut jenis barang terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset), produk kekayaan intelektual (intellectual property products), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2.4.4. Sumber data

Data yang dibutuhkan untuk melakukan estimasi pembentukan modal adalah:

1. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
2. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
3. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
4. Laporan keuangan perusahaan.
5. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
6. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
7. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
8. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
9. Publikasi Statistik Konstruksi.

10. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

11. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2.4.5. Metode Perhitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (commodity flow approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (supply), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan,

dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikasikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "reflate"(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-deflate PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (entertainment, literary, or artistic original products), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (Trade and Transport Margin) sulit diperoleh.
- c. Selang (Lag) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

2.5.1. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.2. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (work in progress), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

2.5.3. Cakupan

Yang digolongkan sebagai inventori ini adalah persediaan berbagai jenis produk barang yang akan digunakan dalam proses ekonomi lebih lanjut. Penguasa barang inventori bisa perusahaan, pemerintah, rumah tangga maupun masyarakat.

Klasifikasi Inventori menurut penguasaan dan jenis barang dibedakan atas:

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Berbagai jenis bahan baku & penolong (material & supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

3. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
8. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Dilihat dari produsen yang menghasilkan (sektor lapangan usaha/sektor industri) seperti pada sektor-sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri manufaktur, gas, air bersih dan konstruksi/bangunan, dimana komoditi yang dihasilkannya diantaranya: beras, jagung, kopi, tebu, kopra, kelapa, teh, kayu (log), arang, bambu, ikan beku, udang beku, minyak bumi, batubara, timah, biji besi, makanan jadi, bahan kimia, semen, alat-alat listrik, mesin-mesin, moda angkutan, gas kota, bangunan dan sejenisnya

Lebih jauh inventori dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Barang yang dibeli tetapi belum terpakai untuk proses produksi (Bahan baku, bahan penolong dan suku cadang).
2. Barang yang belum selesai dalam proses produksi (*Work in Process*).
3. Barang-barang yang belum terjual (yang berada pada pihak produsen atau pedagang).
4. Ternak potong seperti sapi, kambing, ayam, dan sebagainya.
5. Tumbuh-tumbuhan yang sekali tebang (seperti: pinus, bakau dll) dan budidaya perikanan yang semuanya diusahakan dan berada dalam pengawasan. Barang tahan lama (*durable goods*) yang masih dalam proses penyelesaian seperti mesin-mesin, pesawat terbang, kapal laut, kapal penyeberangan dan sejenisnya.

2.5.4. Sumber data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan korporasi dan pendekatan komoditi. Pendekatan korporasi digunakan untuk sektor-sektor antara lain: perdagangan, perhotelan, transportasi, keuangan, dan jasa-jasa. Pendekatan komoditi digunakan untuk sektor-sektor yang data-datanya telah dikumpulkan oleh BPS, seperti: pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, dan industri pengolahan.

Pada pendekatan langsung data mengenai posisi inventori maupun perubahan inventori dapat diperoleh dari laporan perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai sistem pencatatan keuangan yang baik. Sistem yang berbentuk laporan keuangan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dimana transaksi tersebut biasanya dicatat dalam Neraca Akhir Tahun (NAT) pada kelompok transaksi harta (aset) lancar.

Sementara penghitungan dengan metode atau pendekatan tidak langsung data inventori ini bisa diperoleh dari pencatatan lembaga-lembaga atau institusi yang berkepentingan seperti departemen terkait, asosiasi sejenis, pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan.

Apabila data inventori tersebut tersedia dalam bentuk kuantum (volume) maka harus dicari data tentang harga rata-rata yang sesuai dengan jenis dan kriteria masing-masing inventori tersebut. Apabila data tersedia dalam bentuk nilai, baik posisi maupun perubahannya maka dibutuhkan indeks harga yang akan digunakan sebagai deflatornya. Indeks harga tersebut bersumber dari Indeks implisit harga PDB, IHPB, IHK, ataupun indeks harga lain yang tersedia.

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan

- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2.5.5. Metode Perhitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Dilihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (balance sheet) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh berlaku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- Menghitung posisi inventori *adh Konstan*, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori *adh Konstan* dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori *adh Berlaku* dengan menginflate perubahan inventori *adh Konstan* dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (commodity flow). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori.

Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan adjustment dengan cara me-mark-up, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

2.6.1. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

2.6.2. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

2.6.3. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari Kabupaten tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari Kabupaten tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Ekspor Neto Luar Negeri / antar daerah , terdiri dari
 - Ekspor Luar Negeri / antar daerah
 - Impor Luar Negeri / antar daerah

2.6.3. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2.6.4. Metode Perhitungan

1. Ekspor barang

- a. Estimasi nilai ekspor barang atas dasar harga berlaku adalah melalui data ekspor

barang bulanan dari Statistik Ekspor BPS yang nilainya disajikan dalam dolar AS menurut dua digit HS (terinci dalam 99 komoditi).

- b. Nilai ekspor barang dalam dolar AS tersebut disederhanakan menjadi 18 sektor ekonomi. Kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan cara mengalikan nilai dalam dolar AS tersebut dengan kurs ekspor tertimbang.
- c. Memperkirakan nilai ekspor pembelian langsung. Nilai ekspor pembelian langsung ini dikonversikan pula ke dalam nilai rupiah dengan cara mengalikannya dengan kurs ekspor tertimbang. Kemudian nilai pembelian langsung tersebut ditambahkan pada nilai ekspor barang, diperoleh total ekspor barang atas dasar harga berlaku.
- d. Nilai ekspor barang atas dasar harga konstan diperoleh dengan men"deflate" total nilai ekspor barang atas dasar harga berlaku tersebut dengan menggunakan indeks harga per unit (IHPU) ekspor sebagai deflatornya.

2. Impor barang

- a. Estimasi nilai impor barang atas dasar harga berlaku, pada dasarnya sama dengan cara yang digunakan dalam mengestimasi nilai ekspor barang. Nilai impor barang dinyatakan dalam CIF, sehingga komponen biaya asuransinya harus dikeluarkan karena sudah termasuk dalam impor jasa. Seharusnya biaya pengangkutan juga dikeluarkan sehingga diperoleh nilai impor dalam FOB, tapi hal ini belum dilakukan.
- b. Nilai impor barang dalam dolar AS tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan cara mengalikan nilai dalam dolar tersebut dengan kurs impor tertimbang.
- c. Nilai impor barang atas dasar harga konstan diperoleh dengan men"deflate" total impor barang atas dasar harga berlaku dengan indeks harga per unit (IHPU) impor.

3. Ekspor-impor jasa

Dilakukan 3 macam estimasi dengan menggunakan analisis runtun waktu, (*decomposition, winter method dan moving avarage*) untuk melihat range yaitu batas atas, tengah dan batas bawah

Untuk nilai berlaku masih melihat peranan nilai ekspor-impor jasa terhadap barang, di mana rasio ekspor berkisar 8-11 persen sedangkan untuk rasio impor berkisar 26-30 persen.

Untuk deflator ekspor-impor jasa menggunakan deflator yang digunakan pada penghitungan ekspor-impor barang, tapi biasanya dilihat kembali pertumbuhannya. Untuk ekspor jasa mengikuti pergerakan angka pariwisata, tapi untuk impor jasa belum tersedia datanya sehingga masih melihat pertumbuhan impor barang.

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang - PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai Pemberitahuan Impor Barang - PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (direct purchase) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (undocumented transaction) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan "ekspor neto antar wilayah" merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PASER BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2010 – 2014

Proses rebalancing ekonomi dunia mewarnai dinamika perkembangan ekonomi negara maju dan emerging markets (EM) pada tahun 2014. Divergensi respons kebijakan yang ditempuh oleh negara maju dan EM berdampak pada pemulihan ekonomi global yang tidak merata dan berlangsung lebih lambat dari perkiraan semula.

Pemulihan ekonomi global yang masih terbatas tersebut berdampak pada perkembangan harga komoditas global yang masih terus menurun, meskipun dengan laju yang semakin melambat. Selain dipengaruhi oleh permintaan yang rendah, penurunan harga komoditas non-energi juga dipengaruhi oleh beberapa kebijakan di Tiongkok, yang menyebabkan permintaan atas komoditas batubara dan karet menurun. Selain itu, faktor cuaca (el nino delay) juga berpengaruh terhadap melimpahnya pasokan komoditas khususnya minyak kelapa sawit.

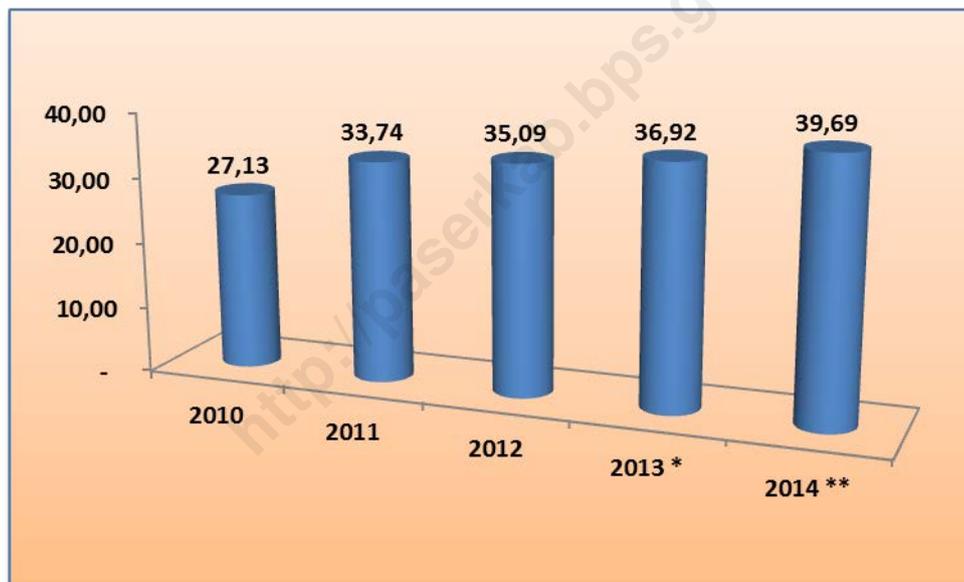
Dinamika ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan dan kebijakan stabilisasi turut memberikan imbas pada perekonomian Indonesia tahun 2014 yang mengalami moderasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,0% dibandingkan dengan 5,6% pada tahun 2013 dan lebih rendah dibandingkan perkiraan pada awal tahun sebesar 5,5-5,9%. Selain bersumber dari perlambatan ekspor, moderasi ekonomi juga disebabkan oleh stimulus fiskal dalam perekonomian yang menurun sejalan dengan program penghematan belanja yang ditempuh Pemerintah. Secara spasial, perlambatan ekonomi terjadi di seluruh kawasan, dengan perlambatan terbesar terjadi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terkait dengan menurunnya kinerja lapangan usaha pertambangan. Pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa yang juga melambat disebabkan oleh pertumbuhan investasi yang lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2014 juga berada dalam tren melambat, dipengaruhi oleh kondisi global yang tidak sesuai harapan serta komoditi andalan ekspor Kalimantan Timur yang mengalami penurunan harga di pasar global. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur melambat menjadi 2,02% dibandingkan dengan 2,72% pada tahun 2013. Ekspor yang melemah dan program penghematan belanja Pemerintah ini pada gilirannya akan menurunkan pendapatan rumah tangga, sehingga konsumsi rumah tangga juga ikut mengalami perlambatan.

3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran

Dinamika ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan memberikan tekanan pada perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2014, yang juga berdampak pada perekonomian Kabupaten Paser. Perbaikan kondisi ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan terlihat dari pemulihan ekonomi negara maju yang terbatas dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang melambat. Permintaan ekonomi global yang masih lemah dan harga komoditas global yang rendah berdampak pada kinerja ekspor Kabupaten Paser yang melambat. Apalagi struktur ekonomi Kabupaten Paser masih bertumpu pada ekspor komoditas berbasis Sumber Daya Alam (SDA), ditambah dengan ekonomi dan kebijakan negara tujuan ekspor yang kurang kondusif sehingga kinerja ekspor melambat.

Grafik 3.1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014



Catatan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Nilai PDRB Kabupaten Paser (adh Berlaku) selama periode tahun 2010 s.d 2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, hal ini bias dilihat pada grafik 3.1. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Nilai nominal PDRB Kabupaten Paser pada tahun 2014 mencapai 39,69 triliun rupiah yang bertambah 2,78 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total nilai tambah atas produk barang dan jasa inilah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan akhir berupa **Konsumsi** (oleh rumah tangga, lembaga swasta nirlaba dan pemerintah), **Investasi** (pembentukan modal tetap

bruto dan perubahan inventori), dan **Ekspor Netto** (ekspor dikurangi impor). Peningkatan ini terutama disebabkan terjadinya peningkatan pada masing-masing komponen pembentuknya. Komponen yang mempunyai peningkatan signifikan ialah ekspor neto sebesar Rp. 1,94 triliun dari sebesar Rp. 24,92 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.26,87 triliun pada tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan peningkatan nilai ekspor lebih tinggi dari pada peningkatan impor Kabupaten Paser.

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB tanpa ada pengaruh perubahan harga. PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Paser berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Grafik 3.2. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

**Grafik 3.2. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014**



Catatan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

PDRB Kabupaten Paser (ADHK 2010) terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, PDRB Kabupaten Paser mencapai angka 34,78 triliun rupiah atau bertambah 1,49 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ekonomi secara riil ini dipicu oleh membaiknya kinerja konsumsi akhir dari berbagai komponen penggunaan terutama net ekspor Kabupaten Paser yang masih positif.

Grafik 3.3 menunjukkan bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

**Grafik 3.3. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam kurun waktu 2011 – 2014, kinerja perekonomian Kabupaten Paser mengalami pertumbuhan yang relative melambat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tahun 2011 sebesar 8,30 persen melambat menjadi 4,49 persen pada tahun 2014, walaupun pertumbuhan Kabupaten Paser masih positif. Secara pengeluaran melambatnya pertumbuhan Kabupaten Paser selama tahun 2014 disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan Ekspor Netto.

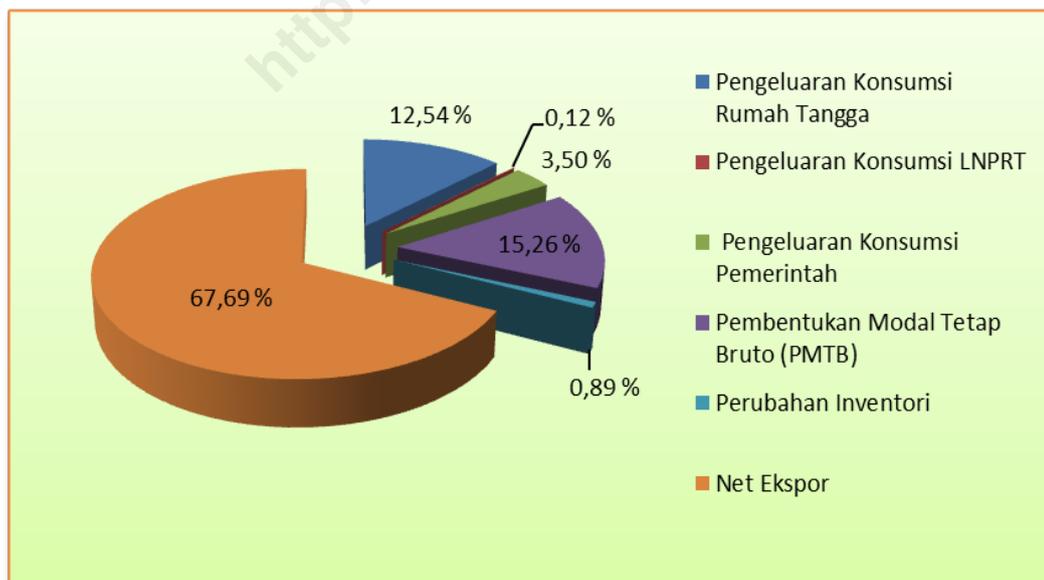
Grafik 3.4. Pertumbuhan PDRB adh Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2014 (persen)



Catatan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Pada tahun 2014, dari keseluruhan nilai PDRB penggunaan di Kabupaten Paser yang paling dominan adalah terutama ditujukan untuk memenuhi keperluan Net ekspor (67,69 persen) sementara pengeluaran yang paling sedikit ialah Konsumsi LNPRT sebesar (0,12 persen).

Grafik 3.5. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2014 (persen)



3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi ketiga dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar komoditi barang untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga berasal dari impor.

Tabel 3.1. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rp)	3.074.890	3.448.156	3.964.977	4.472.624	4.978.542
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	3.074.890	3.231.106	3.491.409	3.695.654	3.940.935
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	11,33	10,22	11,30	12,12	12,54
Rata-rata konsumsi perkapita/tahun					
a. ADHB (Ribu Rp)	13.273	14.501	16.242	17.891	19.434
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	13.273	13.589	14.302	14.783	15.384
Pertumbuhan (persen)					
a. Total konsumsi RT	-	5,08	8,06	5,85	6,64
b. Perkapita	-	2,38	5,25	3,36	4,06
Jumlah penduduk (Jiwa)	231.668	237.782	244.112	249.990	256.175

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 s.d 2014 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 12,54 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 10,22 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik

(termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *ad-hoc* Berlaku maupun *ad-hoc* Konstan 2010. Pada tahun 2010, rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Paser menghabiskan dana sekitar 13,27 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 19,43 juta rupiah pada tahun 2014.

Sementara itu, pada perkiraan *ad-hoc* Konstan 2010, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Paser meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *ad-hoc* Konstan sebesar 5,08 persen pada tahun 2011. Kemudian, meningkat pertumbuhannya pada tahun 2012 menjadi 8,06% dan kembali turun pada dua tahun berikutnya yaitu berturut-turut sebesar 5,85 persen (2013), dan 6,64 persen (2014). Sementara itu, Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara "riil" berkisar antara 2,38 s.d 5,25 persen. Nampak bahwa peningkatan konsumsi per-kapita secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk (tahun 2012-2014) yang umumnya berada di bawah 3 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat pada periode tersebut, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

**Tabel 3.2. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014**

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan dan Minuman, selain restoran	42,36	41,80	42,27	42,92	42,24
b. Pakaian	2,53	2,43	2,36	2,27	2,17
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	18,40	17,61	16,78	16,24	16,05
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,25	4,82	5,07	5,15	5,46
e. Transportasi dan komunikasi	18,85	18,81	18,67	18,37	18,85
f. Restoran dan Hotel	10,27	10,58	10,90	11,22	11,56
g. Lainnya	3,34	3,95	3,94	3,83	3,67
TOTAL KONSUMSI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Secara rata-rata dari tahun 2010 s.d 2014, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Paser, bahwa konsumsi komoditi non makanan (termasuk restoran) lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan, minuman, selain restoran cenderung masih berada pada kisaran yang sama meskipun berfluktuasi. Proporsi untuk kelompok konsumsi tersebut mencapai 42,36 persen (2010); 41,80 persen (2011); 42,27 persen (2012); 42,92 persen (2013); dan 42,24 persen (2014).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik-menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan (Selain restoran) dan non makanan (termasuk restoran) yang masih cukup kuat. Pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, hotel, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

**Tabel 3.3. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014**

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan dan Minuman, selain restoran	-	3,64	7,21	5,36	6,93
b. Pakaian	-	2,76	8,45	3,33	3,09
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	-	2,00	5,86	3,81	4,06
d. Kesehatan dan Pendidikan	-	6,05	10,82	8,22	8,84
e. Transportasi dan komunikasi	-	7,15	9,45	6,26	7,88
f. Restoran dan Hotel	-	8,54	11,69	7,95	7,08
g. Lainnya	-	18,55	7,17	11,40	7,07
TOTAL KONSUMSI	-	5,08	8,06	5,85	6,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Dilihat dari pertumbuhan "riil" nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan maupun non makanan menunjukkan fluktuasi, dengan pertumbuhan tertingginya terjadi pada tahun 2012. Pertumbuhan "riil" ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) maupun kualitas dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya

peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 3.4. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan dan Minuman, selain restoran	-	6,77	8,47	8,69	2,45
b. Pakaian	-	4,84	2,69	5,44	2,93
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	-	5,23	3,50	5,17	5,69
d. Kesehatan dan Pendidikan	-	19,99	9,23	5,70	8,52
e. Transportasi dan komunikasi	-	4,42	4,33	4,42	5,91
f. Restoran dan Hotel	-	6,38	6,07	7,55	7,16
g. Lainnya	-	11,99	7,07	(1,51)	(0,56)
TOTAL KONSUMSI	-	6,72	6,42	6,57	4,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 3.4. menunjukkan peningkatan harga setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga relatif rendah terjadi pada tahun 2014 pada hampir seluruh kelompok konsumsi, dan relatif tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan dan minuman (selain restoran) termasuk didalamnya rokok sebesar 6,77 persen (2011); 8,47 persen (2012); 8,69 persen (2013) dan 2,45 persen (2014).

3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Meskipun demikian, peranan institusi ini dalam perekonomian wilayah masih dapat ditingkatkan lagi mengingat fungsi lembaga non profit yang cukup penting sebagai penyeimbang. Tabel 3.5. menunjukkan proporsi LNPRT dalam perekonomian Kaltim.

Proporsi nilai konsumsi LNPRT terhadap PDRB relatif masih kecil yaitu hanya sekitar 0,3 persen setiap tahunnya. Namun secara nominal (menurut harga berlaku) perkembangannya terus meningkat dari 28,56 miliar rupiah pada tahun 2010 kemudian menjadi 47,12 miliar rupiah pada tahun 2014. Sumber kenaikan ini cukup banyak, antara lain karena makin menjamurnya keberadaan

lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang memberikan perhatian dan bantuan sosial bagi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Paser, termasuk perkembangan organisasi politik menjelang dilaksanakannya PEMILU pada tahun 2014.

**Tabel 3.5. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta Rp)	28.560	31.801	35.192	41.589	47.125
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	28.560	30.217	31.778	35.689	38.077
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,11	0,09	0,10	0,11	0,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir domestik dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Paser serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik berdasarkan *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adh Berlaku* sebesar 722,98 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2014 nilainya mencapai 1.387,99 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, dari hanya 2,66 persen ditahun 2010 hingga menjadi 3,50 persen pada tahun 2014. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2011; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2014 yang mencapai 3,50 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2010

konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 3,12 Juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 3.6.).

**Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Juta Rp)	722.978	843.174	1.028.895	1.201.836	1.387.989
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	722.978	828.676	934.379	1.030.060	1.020.956
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,66	2,50	2,93	3,26	3,50
Rata-rata konsumsi perkapita/tahun					
a. ADHB (Ribu Rp)	3.121	3.546	4.215	4.808	5.418
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	3.121	3.485	3.828	4.120	3.985
Pertumbuhan (persen)					
a. Total konsumsi pemerintah	-	14,62	12,76	10,24	(0,88)
b. Konsumsi Perkapita	-	11,67	9,83	7,65	(3,28)
Jumlah penduduk (Jiwa)	231.668	237.782	244.112	249.990	256.175

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) mengalami perlambatan setiap tahunnya (lihat tabel 3.6.). Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 14,62 persen pada tahun 2011, dan melambat menjadi 12,76 persen di tahun berikutnya. Namun pada 2014 pertumbuhannya minus sebesar 0,88 persen.

3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital) . Fungsi kapital adalah

sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga masih menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan, PMTB dalam kurun waktu 2011 – 2014 mengalami pertumbuhan meskipun melemah dari sebesar 20,07 persen (2011) menjadi 0,21 persen (2014).

**Tabel 3.7. Perkembangan Pembentukan Modal Bruto (PMTB)
Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Juta Rp)	4.009.064	5.041.983	5.566.727	6.028.148	6.057.246
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	4.009.064	4.813.621	5.216.226	5.340.728	5.352.003
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	14,78	14,94	15,86	16,33	15,26
Pertumbuhan terhadap PDRB (% ADHK)	-	20,07	8,36	2,39	0,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Proporsi PMTB terhadap PDRB cenderung meningkat, hal ini terlihat dari proporsi tahun 2010 sebesar 14,78 persen, meningkat pada tahun 2014 menjadi 15,26 persen. Naik turunnya nilai PMTB juga dipengaruhi oleh Penanaman Modal baik dalam negeri maupun Asing.

3.6. Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen ekspor neto antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan.

Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 3.8. Perkembangan Perubahan Inventori
Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Nilai Inventori					
a. ADHB (Juta Rp)	113.949	208.450	238.635	247.250	352.314
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	113.949	181.508	211.890	222.914	308.692
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,42	0,62	0,68	0,67	0,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 proporsi komponen perubahan inventori terhadap PDRB penggunaan Kabupaten Paser selalu positif. Pada tahun 2014 proporsi terhadap PDRB ADHB sebesar 0,89 persen lebih tinggi sebanyak 0,22 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian disadari bahwa tingkat sensitifitas analisis ini masih rendah untuk mengarah pada suatu kesimpulan tertentu, karena faktor keterbatasan ketersediaan dan kontinuitas data yang dapat dihimpun serta sangat beragamnya komoditas barang yang harus dipantau, jadi untuk masa mendatang informasi ini masih perlu disempurnakan.

3.7. Perkembangan Ekspor Neto (Ekspor dikurang Impor)

Ekspor Netto (Net ekspor) merupakan hasil pengurangan Nilai Ekspor dan Impor di Kabupaten Paser. Nilai Ekspor Netto yang positif menunjukkan bahwa Nilai Ekspor lebih besar dari Impor, sedangkan bila negative berarti menunjukkan nilai Impor lebih besar dari Ekspor.

Ekspor menggambarkan tentang berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik akan tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk keperluan analisis regional (daerah) kriteria ekspor jadi diperluas; tidak hanya menyangkut faktor luar negeri saja tetapi juga dianggap wilayah diluar Kabupaten Paser meskipun masih dalam batas wilayah Indonesia tetap diperlakukan sebagai bagian dari ekspor Kabupaten Paser, sehingga struktur ekspor dirinci menjadi dua yaitu ekspor antar negara dan ekspor antar Kabupaten.

**Tabel 3.9. Perkembangan Net Ekspor (Ekpor dikurang Impor)
Kabupaten Paser Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Net Ekspor					
a. ADHB (Juta Rp)	19.181.342	24.171.224	24.258.996	24.924.821	26.869.092
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	19.181.342	20.298.106	21.274.545	22.957.670	24.117.145
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	70,70	71,63	69,13	67,52	67,69
Pertumbuhan terhadap PDRB (% ADHK)	-	5,82	4,81	7,91	5,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Dari tahun 2010 sampai tahun 2014 Net Ekspor di Kabupaten Paser selalu positif dan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa selama periode tersebut nilai ekspor Kabupaten Paser selalu lebih tinggi dari nilai Impornya. Net Ekpor Kabupaten Paser juga mempunyai proporsi terbesar dalam PDRB kabupaten Paser ADHB, Nilainya selalu diatas 65 persen. Sedangkan pertumbuhannya mengalami fluktuasi selama tahun 2010 sampai tahun 2014, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,91 persen, kemudian melambat di tahun 2014 menjadi 5,05 persen.

Perkembangan nilai total ekspor Kabupaten Paser, terus meningkat tiap tahunnya. Penopang tumbuhnya ekspor di tahun 2014 adalah komoditas eskpor non migas, terutama dari batubara, dan disusul oleh hasil Perikanan dan Industri pengolahan seperti CPO, Kernel, Perahu Kayu dan Hasil Industri Makanan juga menjadi bagian dari komoditas yang di Ekspor. Jenis permintaan impor Kabupaten Paser diantaranya adalah mesin dan peralatan barang modal lainnya, bahan baku industri sampai dengan barang-barang konsumsi. Kenaikan barang impor terjadi cukup besar di komponen mesin, peralatan dan barang komsumsi.

BAB IV

PERKEMBANGAN ANGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN

KABUPATEN PASER TAHUN 2010 - 2014

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB PERKAPITA

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per-kapita. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Paser rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

PDRB per-kapita Kabupaten Paser menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2014. Sementara itu pertumbuhan PDRB per-kapita secara "riil" cenderung selalu melemah. Pada tahun 2011 pertumbuhan PDRB per-kapita sebesar 5,52 persen, melemah menjadi 3,30 persen pada tahun 2012, menguat menjadi 4,30 persen pada tahun 2013, dan mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,97 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2011 sampai 2013, pertumbuhan PDRB per-kapita ini masih di atas pertumbuhan penduduk yang ada, tapi tahun 2014 pertumbuhannya telah berada di bawah pertumbuhan penduduk Kabupaten Paser.

**Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
a. ADHB (Juta Rp)	27.130.783	33.744.788	35.093.422	36.916.267	39.692.307
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	27.130.783	29.383.234	31.160.226	33.282.715	34.777.808
PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	117.111	141.915	143.760	147.671	154.942
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	117.111	123.572	127.647	133.136	135.758
Pertumbuhan (persen)					
a. PDRB perkapita ADHK 2010	-	5,52	3,30	4,30	1,97
b. Pertumbuhan Penduduk	-	2,64	2,66	2,41	2,47
Jumlah penduduk (Jiwa)	231.668	237.782	244.112	249.990	256.175

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

4.2. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa hanya sebagian kecil penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Paser digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Paser, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB berfluktuasi, dari sebesar 0,77 pada tahun 2010 dan turun di tahun 2011 menjadi 0,64, Pada tahun-tahun berikutnya rasionya terus mengalami peningkatan menjadi 0,71 (2012), 0,74 (2013) dan 0,82 (2014). Hal ini terjadi karena pertumbuhan investasi lebih lambat dari pada pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 4.2. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	3.074.890	3.448.156	3.964.977	4.472.624	4.978.542
Total Konsumsi PMTB (ADHB) (Juta Rp)	4.009.064	5.041.983	5.566.727	6.028.148	6.057.246
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	0,77	0,68	0,71	0,74	0,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

4.3. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 4.3. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah Tangga	3.074.890	3.448.156	3.964.977	4.472.624	4.978.542
b. LNPRT	28.560	31.801	35.192	41.589	47.125
c. Pemerintah	722.978	843.174	1.028.895	1.201.836	1.387.989
Jumlah	3.826.428	4.323.131	5.029.064	5.716.049	6.413.656
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	27.130.783	33.744.788	35.093.422	36.916.267	39.692.307
Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB (% - ADHB)	14,10	12,81	14,33	15,48	16,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Hanya sebagian kecil barang dan jasa yang berada di wilayah Kabupaten Paser digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (kurang dari 25 persen). Seiring konsumsi akhir yang makin meningkat setiap tahunnya, proporsinya terhadap PDRB juga semakin meningkat. Namun produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang sangat besar di Kabupaten Paser.

4.4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus-menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana :

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Efisiensi investasi dapat dilihat dari berapa besar koefisien ICOR yang diperoleh. World economic study menjelaskan bahwa 70% Negara berkembang memiliki rasio modal output antara 3 dan 4 (Jhingan, 617:2007). Rosenstein-Rodan dan Lewis (Arsyad, 232:2005) memperkirakan bahwa

rasio efisiensi investasi terletak antara 3 sampai 4. Artinya bahwa investasi dikatakan efisien apabila nilai ICOR yang diperoleh berada antara 3 dan 4. Apabila nilai ICOR semakin kurang dari 3 maka dapat dikatakan investasi tersebut sangat efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan apabila nilai ICOR melebihi 4 maka dapat dikatakan investasi tersebut semakin tidak efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 4.4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR),
Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Juta Rp)	27.130.783	29.383.234	31.160.226	33.282.715	34.777.808
Perubahan (Juta Rp)	-	2.252.451	1.776.992	2.122.489	1.495.093
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rp)	4.009.064	4.813.621	5.216.226	5.340.728	5.352.003
ICOR	-	2,14	2,94	2,52	3,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Dari Tabel 4.4 tampak bahwa dari periode tahun 2010-2014, nilai ICOR berfluktuasi. Tampak pula bahwa investasi di Kabupaten Paser terbilang cukup efisien karena nilai ICOR dari tahun 2010 - 2014 berada dibawah 4. Pada tahun 2010, nilai ICOR yang diperoleh sebesar 2,14 artinya bahwa untuk memperoleh penambahan output sebesar 1 unit pada tahun 2010 dibutuhkan investasi sebesar 2,14 unit. Sedangkan pada tahun 2014, nilai ICOR yang diperoleh sebesar 3,58.

BAB V

PENUTUP

1. Nilai nominal PDRB Kabupaten Paser pada tahun 2014 mencapai 39,69 triliun rupiah yang bertambah 2,78 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan terjadinya peningkatan pada masing-masing komponen pembentuknya.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2014 berada dalam tren melambat yakni 4,49% dibandingkan dengan 6,81% pada tahun 2013. Hal ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan pada ekspor neto dan konsumsi akhir LNPRT, serta terjadi kontraksi pertumbuhan konsumsi akhir Pemerintah.
3. Pada Tahun 2011 sampai tahun 2013 Pertumbuhan PDRB per-kapita secara "riil" selalu lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk, sedangkan Pada tahun 2014 pertumbuhan PDRB per-kapita sebesar 1,97 persen, lebih rendah dari pertumbuhan penduduk sebesar 2,47 persen.
4. Rasio konsumsi rumahtangga terhadap PMTB masih kecil yakni masing-masing sebesar 0,77 pada tahun 2010. Rasio ini cenderung membesar setiap tahunnya dan pada tahun 2014 rasionya telah mencapai 0,82 terhadap terhadap PMTB. Peningkatan ini terutama disebabkan karena pertumbuhan konsumsi rumahtangga lebih cepat dibandingkan pertumbuhan investasi di setiap tahunnya.
5. Investasi di Kabupaten Paser terbilang cukup efisien karena nilai ICOR dari tahun 2010-2014 selalu berada dibawah 4.

DAFTAR ISTILAH PENTING

Domestik adalah batas teritori kegiatan ekonomi yang hampir mendekati konsep wilayah teritori suatu negara/wilayah/daerah secara hukum (batas administrasi). Merupakan terminologi baku yang digunakan dalam penyusunan statistik neraca nasional yang memberikan batasan jelas tentang wawasan ekonomi penduduk, baik residen maupun non-residen.

Ekspor Barang dan Jasa meliputi seluruh transfer dan penjualan barang dan jasa dari residen (penduduk) suatu negara/wilayah ekonomi domestik ke residen negara/wilayah ekonomi domestik lainnya dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam prakteknya, ekspor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang keluar melalui daerah batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung di negara tersebut oleh perwakilan negara asing dan orang-orang non residen (staf diplomat dan keluarganya). Karena ekspor barang dagangan suatu negara dinilai atas dasar FOB (*free on board*), maka nilai ekspor tidak termasuk pengapalan dan asuransi sampai pada negara tujuan.

Ekonomi domestik adalah berbagai kegiatan ekonomi dalam wilayah domestik suatu negara/wilayah/daerah yang dibedakan dengan luar negeri karena konsep "residen", bukan karena unsur kebangsaan ataupun mata uang. Terdiri dari unit-unit institusi ekonomi yang diselenggarakan oleh residen. Konsep ini tidak selalu identik dengan batas wilayah administrasi secara politik.

Faktor Produksi mencakup faktor-faktor yang terlibat dalam suatu proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian.

Faktor Pendapatan dari Luar Negeri merupakan pendapatan/kompensasi yang diterima oleh faktor produksi, atas keterlibatannya dalam suatu produksi di luar batas wilayah domestik.

Harga Berlaku penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.

Harga Konstan penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.

Impor Barang dan Jasa meliputi seluruh transfer dan pembelian barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lainnya dilakukan baik dalam wilayah domestik maupun di luar negeri. Pada prakteknya, impor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang melewati batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung oleh pemerintah, penduduk dan perwakilan negara tersebut di luar negeri. Karena impor barang-barang dagangan dinilai dengan CIF, maka nilai barang termasuk biaya pengangkutan dan asuransi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto meliputi pembuatan dan pembelian barang modal baru baik dari dalam negeri maupun impor, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (domestik).

Penyusutan adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.

Permintaan Antara merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi proses produksi.

Permintaan akhir merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi konsumsi akhir, pembentukan modal ekspor.

Produk adalah output (keluaran) yang dihasilkan dari suatu proses produksi yang dilakukan oleh para produsen (residen) di wilayah domestik, pada satu waktu tertentu. Produk yang dalam istilah lain disebut sebagai komoditi ini menurut sifatnya dibedakan atas produk dalam bentuk barang (*good/tangible*) serta jasa (*service/intangible*).

Produk domestik adalah nilai akhir produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi dalam sistem ekonomi domestik, setelah diperhitungkan dengan nilai barang dan jasa yang

berasal dari impor. Total penyediaan produk yang berasal dari produk domestik dan impor disebut sebagai total penyediaan (*supply*).

Residen adalah unit institusi yang mempunyai pusat kegiatan ekonomi dalam batas ekonomi suatu negara (*centre of economic interest*). Peran penting ini ditandai dengan dua faktor penting yaitu tempat tinggal (*dwelling*) dan tempat aktivitas berproduksi dalam jangka waktu yang relatif panjang, biasanya satu tahun. Tujuannya untuk membedakan batas teritori suatu negara terhadap negara-negara lainnya (*rest of the world*). Unit ekonomi yang bukan merupakan residen suatu negara dianggap sebagai sektor luar negeri / asing (*non residen*).

Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

Wilayah ekonomi adalah wilayah geografi yang secara administrasi dikelola oleh suatu pemerintahan (negara), dimana manusia, barang dan modal bebas berpindah, yang meliputi wilayah udara, darat dan perairan. Selain itu wilayah ekonomi ini juga mencakup wilayah khusus seperti kedutaan, konsulat dan pangkalan militer, serta zona bebas aktif (lepas pantai).

Ekspor Neto/Net Ekspor adalah Selisih antara nilai jumlah barang dan jasa yang di Ekspor dengan nilai jumlah barang dan jasa yang di Impor oleh suatu Wilayah.



LAMPIRAN

**TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN PASER (Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013 *	2014 **
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3.074.890	3.448.156	3.964.977	4.472.624	4.978.542
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	1.302.548	1.441.381	1.676.160	1.919.593	2.102.975
1.b. Pakaian	77.832	83.852	93.383	101.741	107.952
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	565.854	607.383	665.469	726.538	799.063
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	130.615	166.207	201.193	230.144	271.826
1.e. Transportasi dan komunikasi	579.635	648.473	740.458	821.552	938.644
1.f. Restoran dan Hotel	315.833	364.682	432.052	501.607	575.539
1.g. Lainnya	102.573	136.178	156.262	171.449	182.545
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	28.560	31.801	35.192	41.589	47.125
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	722.978	843.174	1.028.895	1.201.836	1.387.989
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4.009.064	5.041.983	5.566.727	6.028.148	6.057.246
5. Perubahan Inventori	113.949	208.450	238.635	247.250	352.314
6. Net Ekspor	19.181.342	24.171.224	24.258.996	24.924.821	26.869.092
P D R B	27.130.783	33.744.788	35.093.422	36.916.267	39.692.307

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN PASER (Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3.074.890	3.231.106	3.491.409	3.695.654	3.940.935
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	1.302.548	1.349.955	1.447.244	1.524.877	1.630.533
1.b. Pakaian	77.832	79.983	86.738	89.630	92.396
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	565.854	577.188	610.997	634.280	660.059
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	130.615	138.513	153.500	166.114	180.796
1.e. Transportasi dan komunikasi	579.635	621.052	679.721	722.263	779.154
1.f. Restoran dan Hotel	315.833	342.816	382.896	413.320	442.567
1.g. Lainnya	102.573	121.599	130.314	145.172	155.430
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	28.560	30.217	31.778	35.689	38.077
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	722.978	828.676	934.379	1.030.060	1.020.956
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4.009.064	4.813.621	5.216.226	5.340.728	5.352.003
5. Perubahan Inventori	113.949	181.508	211.890	222.914	308.692
6. Net Ekspor	19.181.342	20.298.106	21.274.545	22.957.670	24.117.145
PDRB	27.130.783	29.383.234	31.160.226	33.282.715	34.777.808

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Persen)
KABUPATEN PASER

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013 *	2014 **
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	11,33	10,22	11,30	12,12	12,54
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	4,80	4,27	4,78	5,20	5,30
1.b. Pakaian	0,29	0,25	0,27	0,28	0,27
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	2,09	1,80	1,90	1,97	2,01
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,48	0,49	0,57	0,62	0,68
1.e. Transportasi dan komunikasi	2,14	1,92	2,11	2,23	2,36
1.f. Restoran dan Hotel	1,16	1,08	1,23	1,36	1,45
1.g. Lainnya	0,38	0,40	0,45	0,46	0,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,11	0,09	0,10	0,11	0,12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,66	2,50	2,93	3,26	3,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	14,78	14,94	15,86	16,33	15,26
5. Perubahan Inventori	0,42	0,62	0,68	0,67	0,89
6. Net Ekspor	70,70	71,63	69,13	67,52	67,69
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN (Persen)
KABUPATEN PASER

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013 *	2014 **
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	11,33	11,00	11,20	11,10	11,33
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	4,80	4,59	4,64	4,58	4,69
1.b. Pakaian	0,29	0,27	0,28	0,27	0,27
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	2,09	1,96	1,96	1,91	1,90
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,48	0,47	0,49	0,50	0,52
1.e. Transportasi dan komunikasi	2,14	2,11	2,18	2,17	2,24
1.f. Restoran dan Hotel	1,16	1,17	1,23	1,24	1,27
1.g. Lainnya	0,38	0,41	0,42	0,44	0,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,66	2,82	3,00	3,09	2,94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	14,78	16,38	16,74	16,05	15,39
5. Perubahan Inventori	0,42	0,62	0,68	0,67	0,89
6. Net Ekspor	70,70	69,08	68,27	68,98	69,35
	100	100	100	100	100

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

TABEL 5. PERTUMBUHAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN (persen)
KABUPATEN PASER

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013 *	2014 **
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	-	12,14	14,99	12,80	11,31
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	-	10,66	16,29	14,52	9,55
1.b. Pakaian	-	7,73	11,37	8,95	6,10
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	-	7,34	9,56	9,18	9,98
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-	27,25	21,05	14,39	18,11
1.e. Transportasi dan komunikasi	-	11,88	14,18	10,95	14,25
1.f. Restoran dan Hotel	-	15,47	18,47	16,10	14,74
1.g. Lainnya	-	32,76	14,75	9,72	6,47
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-	11,35	10,66	18,18	13,31
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-	16,63	22,03	16,81	15,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	-	25,76	10,41	8,29	0,48
5. Perubahan Inventori	-	82,93	14,48	3,61	42,49
6. Net Ekspor	-	26,01	0,36	2,74	7,80
	-	24,38	4,00	5,19	7,52

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**TABEL 6. PERTUMBUHAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT PENGELUARAN (persen)
KABUPATEN PASER**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013 *	2014 **
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	-	5,08	8,06	5,85	6,64
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	-	3,64	7,21	5,36	6,93
1.b. Pakaian	-	2,76	8,45	3,33	3,09
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	-	2,00	5,86	3,81	4,06
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-	6,05	10,82	8,22	8,84
1.e. Transportasi dan komunikasi	-	7,15	9,45	6,26	7,88
1.f. Restoran dan Hotel	-	8,54	11,69	7,95	7,08
1.g. Lainnya	-	18,55	7,17	11,40	7,07
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-	5,80	5,17	12,31	6,69
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-	14,62	12,76	10,24	(0,88)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	-	20,07	8,36	2,39	0,21
5. Perubahan Inventori	-	59,29	16,74	5,20	38,48
6. Net Ekspor	-	5,82	4,81	7,91	5,05
	-	8,30	6,05	6,81	4,49

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

TABEL 7. INDEKS HARGA IMPLISIT PDRB 2010 = 100 (persen)
KABUPATEN PASER

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013 *	2014 **
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	106,72	113,56	121,02	126,33
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	100,00	106,77	115,82	125,89	128,97
1.b. Pakaian	100,00	104,84	107,66	113,51	116,84
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	100,00	105,23	108,92	114,55	121,06
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	119,99	131,07	138,55	150,35
1.e. Transportasi dan komunikasi	100,00	104,42	108,94	113,75	120,47
1.f. Restoran dan Hotel	100,00	106,38	112,84	121,36	130,05
1.g. Lainnya	100,00	111,99	119,91	118,10	117,44
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	105,24	110,74	116,53	123,76
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	101,75	110,12	116,68	135,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	100,00	104,74	106,72	112,87	113,18
5. Perubahan Inventori	100,00	114,84	112,62	110,92	114,13
6. Net Ekspor	100,00	119,08	114,03	108,57	111,41
PDRB	100,00	114,84	112,62	110,92	114,13

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

TABEL 8. LAJU PERTUMBUHAN INDEKS HARGA IMPLISIT PDRB 2010 = 100 (PERSEN)
KABUPATEN PASER

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013 *	2014 **
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)		6,72	6,42	6,57	4,38
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran		6,77	8,47	8,69	2,45
1.b. Pakaian		4,84	2,69	5,44	2,93
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga		5,23	3,50	5,17	5,69
1.d. Kesehatan dan Pendidikan		19,99	9,23	5,70	8,52
1.e. Transportasi dan komunikasi		4,42	4,33	4,42	5,91
1.f. Restoran dan Hotel		6,38	6,07	7,55	7,16
1.g. Lainnya		11,99	7,07	(1,51)	(0,56)
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT		5,24	5,23	5,23	6,21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		1,75	8,22	5,96	16,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)		4,74	1,89	5,76	0,27
5. Perubahan Inventori		14,84	(1,93)	(1,51)	2,90
6. Net Ekspor		19,08	(4,24)	(4,79)	2,62
PDRB		14,84	(1,93)	(1,51)	2,90

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No. 76 Tana Paser Tep/Fax (0543)21219
email : bps6401@bps.go.id, website : <http://paserkab.bps.go.id>